

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda

Pelaksanaan pendidikan di SMK Negeri 1 Metro telah didukung oleh fasilitas, manajemen pengelolaan dan menerapkan proses yang bermutu, namun penyelarasan standar kompetensi siswa terhadap kebutuhan dunia industri / dunia usaha belum secara maksimal diupayakan.

Dalam pengelolan pendidikan sistem ganda di SMK Negeri 1 Metro, keterlibatan komite sekolah / majelis sekolah belum dapat berperan secara optimal. Hal ini selain disebabkan karena kesibukan dan keterbatasan pengurus komite juga disebabkan karena minimnya anggota komite sekolah yang merupakan berasal dari dunia usaha / industri serta lemahnya koordinasi sekolah dengan komite dalam proses pendidikan. Keterlibatan komite sekolah masih terfokus pada dukungan dalam pembiayaan pendidikan di sekolah. Proses pengelolaan pendidikan sistem ganda masih didominasi oleh sekolah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Begitu pula dengan peran institusi pasangan masih sebatas sebagai tempat lahan praktik bagi siswa

SMK, sebagaimana diterapkan pada SMK sebelum diberlakukannya kebijakan *link and match*.

Dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Metro belum melibatkan pihak institusi pasangan untuk turut serta menentukan kualifikasi calon peserta didik. Padahal untuk menuju pada relevansi kualitas lulusan SMK harus dimulai dari penerimaan peserta didik ini.

Begitu pula dalam penyusunan kurikulum SMK, unsur dunia usaha / industri belum dilibatkan secara langsung. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum disusun oleh guru-guru SMK Negeri 1 Metro dengan difasilitasi oleh pengawas pendidikan setempat. Dengan cara ini, standar kompetensi – standar kompetensi yang berkembang secara praktis dilapangan tidak akan dapat diadopsi oleh sekolah secara maksimal.

Proses pembelajaran disekolah tidak mewajibkan SMK untuk melibatkan institusi pasangan dalam proses pembelajaran, tetapi dapat melibatkan institusi pasangan bila kompetensinya diperlukan. Melibatkan institusi pasangan dalam proses pembelajaran disekolah telah dilaksanakan pada sebagian program keahlian. Namun frekwensi dan durasi pelaksanaannya masih sangat minimal dan belum secara rutin/konsisten dilaksanakan. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi lulusan SMK yang lebih konsentrasi pada penguasaan ketrampilan psikomotorik, sebaiknya keterlibatan institusi pasangan perlu ditingkatkan.

Dalam praktik kerja industri belum ditetapkan persyaratan kompetensi awal yang harus dimiliki siswa untuk dapat mengikuti prakerin. Hal ini berdampak

pada bervariasinya kemampuan awal peserta didik yang mengikuti prakerin. Siswa yang secara konseptual teori belum menguasai materi pendidikan dan pelatihan kemudian dipaksakan untuk mengikuti prakerin akan berdampak pada lemahnya kemampuan siswa dalam melaksanakan prakerin di institusi pasangan. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan pimpinan institusi pasangan tidak percaya pada lulusan SMK karena dalam kegiatan prakerin yang selama ini dilaksanakan di perusahaannya siswa tidak mampu menunjukkan kompetensi yang meyakinkan.

Standar / profil kompetensi keahlian yang dituntut dalam pelaksanaan prakerin selama ini hanya ditetapkan oleh pihak sekolah saja. Profil kompetensi ini disusun dengan mengacu pada kurikulum yang ada. Tidak dilibatkannya institusi pasangan dalam perencanaan prakerin ini berdampak pada tidak terkomodasinya kompetensi praktis yang berkembang di perusahaan / industri. Penyusunan profil kompetensi yang tidak memperhatikan masukan dari institusi pasangan ini berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian kompetensi keahlian yang dapat dilaksanakan / dikerjakan oleh siswa SMK Negeri 1 Metro di institusi pasangan yang selama ini terjadi.

Kegiatan kunjungan industri yang selama ini berlangsung merupakan kegiatan yang positif. Hal ini sesuai dengan harapan sekolah dalam rangka memperkaya wawasan dan pengalaman siswa. Namun tujuan sekolah untuk menjadikan kunjungan industri sebagai sarana memperluas peluang peserta didik dalam mencari kerja setelah lulus sekolah tidak tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan karena perusahaan dan industri di Yogyakarta dan Solo sebagai daerah

yang dikunjungi, secara geografis terlalu jauh untuk dijangkau siswa. Dalam praktiknya lulusan SMK Negeri 1 Metro lebih banyak yang bekerja di daerah Lampung, Banten, DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan ujian kompetensi, keterlibatan institusi pasangan sudah cukup baik. Institusi pasangan telah secara langsung terlibat dalam ujian kompetensi. Namun rasio asesor eksternal dengan jumlah siswa masih terlalu minim. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan ujian kompetensi perlu ditambah jumlah asesor eksternal dalam pelaksanaan ujian kompetensi.

Rendahnya keterlibatan majelis sekolah/komite sekolah dan institusi pasangan dalam proses pendidikan di SMK Negeri 1 Metro membuat tujuan ideal pendidikan sistem ganda menuju lulusan SMK yang *link and match* dengan kebutuhan industri tidak dapat terwujud. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pendidikan sistem ganda di SMK Negeri 1 Metro belum berjalan secara optimal.

2. Kesesuaian Pelaksanaan PSG dengan Standar Pelaksanaan

Sekolah belum menetapkan standar pelaksanaan PSG secara tertulis, namun dari standar normatif yang disampaikan melalui wawancara masih banyak ketidaksesuaian pelaksanaan yang terjadi. Seperti : tidak aktifnya komite sekolah dalam menjalankan perannya, minimnya peran institusi pasangan dalam kegiatan PSG, tidak seragamnya kompetensi awal peserta didik saat akan prakerin, proses bimbingan yang cenderung bersifat normatif, serta tidak efektifnya lokasi

kunjungan industri dalam menyerap siswa sebagai tenaga kerja setelah lulus sekolah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

SMK Negeri 1 Metro sebagai sekolah negeri telah lama menjalankan proses pendidikan memiliki faktor pendukung proses pendidikan antara lain : 1) fasilitas pendidikan yang memadai, 2) SDM yang berkualitas, 3) citra sekolah yang sudah terbangun dengan baik di masyarakat, 4) lokasi yang strategi serta dukungan dari masyarakat dan dunia industri yang sangat baik.

Namun demikian SMK Negeri 1 Metro juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain : 1) lemahnya pemahaman warga sekolah tentang visi, misi sekolah dalam mengimplementasikan model pendidikan sistem ganda, 2) lemahnya motivasi internal guru dan karyawan dalam bekerja, 3) keterbatasan sumber dana penyelenggaraan pendidikan, 4) lemahnya koordinasi antar bagian di sekolah, dan 5) lemahnya penguasaan TIK sebagian guru.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan analisis temuan di lapangan, maka berikut dikemukakan beberapa rekomendasi untuk kepentingan dan kemajuan di masa yang akan datang yaitu:

1. Bagi Guru

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan dewan guru yang berkualitas, memiliki motivasi internal dalam bekerja dengan baik, menguasai TIK, dan memahami perkembangan dunia

usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada dewan guru untuk selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang relevan, magang di dunia industri, mengikuti perkembangan TIK serta bekerja dengan dilandasi ketulusan dan kesungguhan.

2. Bagi Kepala Sekolah

Sekolah hendaknya memulai inisiatif untuk mengaktifkan peran majelis sekolah atau komite sekolah dalam membantu memediasi kerjasama yang produktif antara SMK dengan institusi pasangan. Kesenjangan hubungan antara sekolah dengan institusi pasangan yang selama ini terjadi sangat memungkinkan untuk difasilitasi oleh adanya majelis sekolah / komite sekolah yang produktif. Keterlibatan institusi pasangan dalam pendidikan sistem ganda ini tidak hanya terbatas pada praktek kerja industri tetapi juga pada seluruh kegiatan SMK mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai dengan pemasaran alumni.

Keterlibatan institusi pasangan dalam proses pendidikan pendidikan sistem ganda bersifat mutlak. Untuk itu, keberadaan majelis sekolah harus ada. Walaupun majelis sekolah ini diganti istilah dengan Komite Sekolah, hendaknya keterlibatan unsur institusi pasangan / asosiasi industri dan organisasi profesi harus dalam kepengurusan komite sekolah harus lebih dominan. Hal ini bertujuan agar partisipasi dunia industri dalam proses pendidikan akan lebih maksimal.

Pengelolaan PSG di sekolah sebaiknya dikelola oleh kelompok kerja yang bersifat tetap. Hal ini bertujuan agar proses pembenahan dalam pelaksanaan PSG

dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu pekerjaan PSG merupakan pekerjaan yang tidak terputus sepanjang waktu selama SMK tersebut masih menggunakan pola PSG.

Keterlibatan institusi pasangan dalam proses penerimaan peserta didik baru sangat penting. Hal ini berguna untuk mendapatkan calon peserta didik yang unggul dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kualitas calon tenaga kerja yang akan dihasilkan sangat ditentukan oleh calon peserta didik yang direkrut oleh SMK.

Dalam penyusunan kurikulum, hendaknya institusi pasangan selalu dilibatkan. Sebagaimana dipahami bersama, bahwa ilmu, ketrampilan kerja, alat-alat kerja dan seni dalam bekerja selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peradaban manusia. Industri adalah pihak yang seringkali terlebih dahulu merespon perkembangan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu sekolah seringkali dihadapkan oleh keterbatasan-keterbatasan perlengkapan praktik serta ketertinggalan ilmu dan seni dalam bekerja. Menyikapi hal tersebut, sangat penting untuk melibatkan institusi pasangan dalam proses penyusunan kurikulum, dengan harapan perkembangan yang terdapat disektor industri dapat ditransfer ke sekolah dengan segera.

Proses pembelajaran disekolah, terutama untuk komponen pembelajaran praktik produktif perlu melibatkan unsur institusi pasangan. Praktik produktif akan lebih luwes diajarkan oleh orang yang sehari-harinya melakukan pekerjaan-

pekerjaan tersebut. Begitu pula adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam praktik produktif akan dengan mudah diidentifikasi oleh orang yang sudah terbiasa dan mahir melakukannya. Proses pelibatan institusi pasangan dalam pembelajaran disekolah dapat sebagai guru tamu atau sebagai anggota tim pendidik dalam suatu mata pelajaran.

Perlu dilakukan seleksi terhadap peserta didik yang dapat mengikuti praktik kerja industri (prakerin). Seleksi ini hendaknya didasarkan oleh kriteria tertentu yang ditetapkan secara bersama-sama antara sekolah dengan institusi pasangan. Kriteria sebaiknya lebih ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam menguasai komponen produktif daripada sekedar pada kelas (tingkat) peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil dari prakerin tersebut. Peserta didik yang belum menguasai materi pendidikan dan pelatihan sebaiknya tidak dipaksakan untuk mengikuti prakerin walaupun sudah berada pada semester 4.

Dalam menyusun target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam prakerin hendak dengan melibatkan unsur institusi pasangan. Hal ini dimaksudkan agar kompetensi ini sesuai / relevan dengan kondisi lapangan.

Guru-guru yang dilibatkan sebagai pembimbing prakerin hendaknya guru yang memiliki kompetensi produktif yang sesuai dengan siswa yang dibimbing. Hal ini penting untuk memantau perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik dan mengarahkan siswa secara lebih mendalam.

Perlu dilakukan standarisasi secara bersama-sama antara SMK dengan institusi pasangan tentang kriteria siswa yang dinyatakan kompeten dalam mengikuti prakerin. Standar kelulusan ini tidak hanya terfokus pada nilai yang bersifat normatif atau administratif belaka tetapi lebih ditekankan pada standar kompetensi siswa setelah mengikuti prakerin. Standar ini disampaikan kepada siswa sebelum pelaksanaan prakerin sehingga siswa memiliki kesungguhan dalam melaksanakan prakerin. Selain itu adanya standar ini juga akan membuat kegiatan prakerin yang dilaksanakan oleh siswa lebih terfokus pada kompetensi yang telah ditetapkan bersama.

Kunjungan industri merupakan kegiatan yang sangat positif dalam menunjang kompetensi peserta didik serta memperluas wawasannya. Kegiatan ini secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembenahan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kunjungan industri, tempat pelaksanaan hendaknya lebih diarahkan pada industri yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi program keahlian yang diselenggarakan oleh SMK. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperluas wawasan keahlian peserta didik. Selain itu lokasi kunjungan industri sebaiknya juga yang memungkinkan peserta didik untuk mencari pekerjaan setelah lulus SMK.

Dalam ujian kompetensi hendaknya proses pelaksanaan ujian kompetensi menggunakan situasi yang ideal. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menggunakan fasilitas institusi pasangan yang telah standar atau mendekati standar. Untuk memperlancar pelaksanaan ujian kompetensi, sekolah sebaiknya menyiapkan laboratorium yang terstandar.

Perlu dilakukan peninjauan kembali naskah kerjasama antara SMK dengan institusi pasangan dalam pemasaran alumni. Pihak sekolah melalui BKK harus selalu aktif meminta informasi kepada institusi pasangan terkait adanya rekrutmen pegawai baru di perusahaannya.

Selain itu, sekolah harus lebih terbuka menerima peran serta dari masyarakat terutama dari sektor industri untuk turut serta menentukan arah dan kualitas lulusan SMK kedepan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan memfungsikan komite sekolah / majelis sekolah.

3. Bagi Institusi Pasangan

Pendidikan sistem ganda merupakan kerjasama simbiosis mutualisme, artinya kerjasama ini kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi institusi pasangan, kegiatan pendidikan sistem ganda akan menguntungkan karena perusahaannya akan terbantu dengan adanya peserta didik dari SMK yang sedang praktek. Dalam jangka panjang, adanya lulusan SMK yang berkualitas akan memacu peningkatan produktifitas perusahaan serta mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan training. Oleh karena institusi pasangan hendaknya selalu meningkatkan peran dan meningkatkan kerjasama dengan pihak SMK.

4. Bagi Kepala Dinas Pendidikan

Kepala dinas pendidikan selaku wakil dari pemerintah kota hendaknya membantu SMK dalam mewujudkan kerjasama antara SMK dengan membuat kebijakan-kebijakan dan sistem regulasi pendidikan yang mendorong terjalannya

kerjasama yang produktif antara SMK dengan institusi pasangan. Termasuk didalamnya adalah menekankan institusi pasangan yang berada diwilayah kerjanya untuk merekrut pegawai dari lulusan SMK lokal.

Selain itu dinas pendidikan hendaknya mendorong peran serta masyarakat terutama masyarakat industri untuk berperan secara aktif dalam proses pendidikan dan pelatihan di SMK dalam semua aspek pendidikan.

